



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dari Revisi Pernetapan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014 menunjukkan bahwa dari capaian 6 misi dapat disajikan data sebagai berikut:

1. Misi pertama dengan 8 sasaran dan 47 indikator kinerja. Sejumlah 40 indikator kinerja bernilai sangat baik; 3 indikator kinerja bernilai baik; 2 indikator kinerja bernilai cukup, dan 1 indikator kinerja bernilai kurang, dengan 1 indikator kinerja yang belum bisa diukur
2. Kinerja misi kedua dengan 21 sasaran dan 55 indikator kinerja. Sejumlah 45 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 7 indikator kinerja bernilai cukup, dan 1 indikator kinerja bernilai kurang.
3. Kinerja misi ketiga dengan 25 sasaran dan 53 indikator kinerja. Sejumlah 41 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 7 indikator kinerja bernilai cukup, dan 3 indikator kinerja bernilai kurang.
4. Kinerja misi keempat dengan 19 sasaran dan 100 indikator kinerja. Sejumlah 84 indikator kinerja bernilai sangat baik; 6 indikator kinerja bernilai baik, 5 indikator kinerja bernilai cukup, dan 5 indikator kinerja bernilai kurang.
5. Kinerja misi kelima dengan 24 sasaran dan 173 indikator kinerja. Sejumlah 140 indikator kinerja bernilai sangat baik; 16 indikator kinerja bernilai baik; 6 indikator kinerja bernilai cukup, dan 11 indikator kinerja bernilai kurang.
6. Kinerja misi keenam dengan 8 sasaran dan 17 indikator kinerja. Sejumlah 12 indikator kinerja bernilai sangat baik; 2 indikator kinerja bernilai baik; 3 indikator kinerja bernilai cukup.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satuan Organisasi/Kerja di setiap instansi merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya evaluasi dapat memberikan saran atau perbaikan yang potensial bagi peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi

Pemerintah Kota Magelang Tahun 2013, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015;
2. Telah melaksanakan evaluasi Renstra di semua SKPD;
3. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulan terhadap pencapaian target kinerja melalui monitoring triwulan RKPD dan Revisi Perjanjian Kinerja;
4. Telah melaksanakan revaluasi dan perbaikan Indikator Kinerja Utama Kota Magelang yang lebih berorientasi kepada outcome;
5. Telah memanfaatkan IKU perbaikan dalam Pengukuran Kinerja dan pelaporan kinerja (LkjIP);
6. Berusaha menyajikan laporan kinerja yang fokus pada pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dalam hal ini Revisi Penetapan Kinerja tahun 2014

Dalam memperbaiki kinerja kedepan terkait perencanaan, pelaksanaan dan hal-hal lain perlu diambil langkah-langkah sebagaimana berikut

1. Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
2. Pemahaman kepada segenap stakeholders di SKPD, utamanya pemahaman persepsi melalui FGD, sosialisasi dan pertemuan mengawal proses perencanaan baik level SKPD maupun level Kota
3. Perlunya penyediaan data berbasis fakta yang melibatkan SKPD terkait. Validnya data akan cukup memberikan pengaruh bagi analisa maupun sumber pengambilan keputusan/kebijakan
4. Peningkatan kesadaran dan kualitas intelektual, emosional dan spiritual aparatur dalam menjalankan tugas sebagai aktor utama pembangun negara yang memiliki sifat amanah, dedikasi, integritas dan tanggungjawab yang tinggi.
5. Penguatan komitmen sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing disertai kebersamaan dan kesamaan langkah dalam penyelesaian berbagai persoalan.
6. Peningkatan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam berbagai kapasitas dan pembidangnya seiring dengan peningkatan kualitas keberdayaannya.
7. Perbaikan atau penyempurnaan berbagai kebijakan, tatalaksana, perangkat kelembagaan, hingga reward and punishment.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Dari beberapa permasalahan pada tahun 2014 maka strategipemecahan masalah dan langkah antisipatif yang harus dilakukan antara lain :

1. Belum semua SKPD terhubung dengan jaringan komunikasi data online (WAN Kota), karena dana yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut pada tahun 2014 tidak mencukupi, upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang ada. Jumlah penggunaan software legal/OSS di setiap SKPD dan WAN (Wide Area Network) setiap SKPD harus diupayakan sebagai prioritas utama.

2. Optimalisasi penataan administrasi kependudukan menjadi faktor yang krusial dalam penentuan sasaran program pembangunan daerah, pengambilan kebijakan, maupun dalam penentuan proyeksi dan prediksi ke depan di ranah perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penerbitan akte kelahiran, khususnya bagi anak-anak yang menjadi salah satu indikator penting dalam kerangka mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang.
3. Masih terjadi pelanggaran disiplin oleh PNS, sehingga langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan penerapan absensi sidik jari serta pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan PNS mengenai PP nomor 53 Tahun 2010. Peningkatan disiplin hendaknya diiringi dengan peningkatan budaya kerja. Penilaian disiplin/kinerja pegawai juga harus mempertimbangkan tugas-tugas lain yang diberikan di luar jam kerja dan atau beban kerjanya.
4. Penciptaan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas aparatur, mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi sistem informasi.
5. Peningkatan kapasitas kemampuan pemerintahan daerah, optimalisasi penerapan e-Government, peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil, memperkuat integritas dan disiplin PNS, pengembangan media komunikasi dan informasi, peningkatan kualitas perencanaan yang partisipatif didukung dengan data dan statistik daerah valid dan akurat, dan peningkatan ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan, percepatan reformasi birokras dan akselerasi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mendukung pencapaian standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dalam rangka mendukung daya saing daerah dalam meraih keunggulan kompetitif
6. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang memiliki kompetensi sehingga perlu adanya suatu pedoman penentuan standar kompetensi jabatan.
7. Perlu adanya perluasan daya tarik kota (implementasi pelaksanaan event “Ayo ke Magelang 2015”, dan perluasan branding “Magelang Kota Sejuta Bunga” branding Kota “Magelang Kota Sejuta Bunga”) melalui bidang pariwisata dari event-event yang terselenggara yang dapat menambah jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat melalui peningkatan macam dan jenis usaha.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup untuk mendukung pencitraan Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga yang nyaman untuk transit pelaku usaha dan pengguna jasa antar kota lainnya.
9. Terbatasnya luas wilayah Kota Magelang menjadi kendala investasi, Kota Magelang, harus mampu meningkatkan daya saing daerah untuk menarik investor lokal dan non local dengan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah, mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional dan penataan kawasan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan, serta pengembangan industri pengolahan produk unggulan dan andalan (dari sektor pertanian dalam arti luas) melalui UMKM dan kluster ekonomi rakyat untuk membangun Magelang Kota Jasa Perdagangan dan jasa pendukungnya

10. Mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan industri kreatif pengembangan ekonomi kreativitas masyarakat, serta pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat Peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan manajemen transportasi dan sarana prasarana pendukung transportasi
11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas kawasan melalui peningkatan jalan & jembatan, rehabilitasi saluran air dan irigasi dan utilitas lainnya Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang untuk menciptakan kondisi dan aktivitas lingkungan yang nyaman Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan, Transportasi Angkutan Darat, komunikasi dan informasi, dan Perumahan, serta pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis, didukung dengan penyediaan kelengkapan Rencana Tata Ruang Penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang didukung oleh partisipasi masyarakat Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat, serta Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga kamtibmas Koordinasi antar aparaturnya keamanan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
12. Penguatan kapasitas kota (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) menghadapi tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015; dengan sub prioritas:
13. Pengembangan kebijakan insentif bagi usaha yang menyerap banyak tenaga kerja lokal masyarakat kota Magelang
14. Pengembangan kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk hidup layak
15. Pengembangan Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat (kampung organik) kesiagaan tanggap bencana, dan antisipasi pengurangan resiko bencana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup untuk mendukung pencitraan Magelang sebagai Kota Sejuta Bunga yang nyaman untuk transit pelaku usaha dan pengguna jasa antar kota lainnya dengan . Implementasi manajemen persampahan berbasis masyarakat dengan mengupayakan terbentuknya pengembangan kampung organik
16. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kurang maksimal karena tidak ada personil Satpol PP yang menjadi penyidik (PPNS), upaya yang dilakukan dengan Pengiriman diklat PPNS untuk personil Satpol PP.
17. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bidang pendidikan melalui pemerataan pelayanan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan informal untuk menciptakan SDM yang berkualitas
18. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat lewat melalui pelayanan puskesmas dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit
19. Perluasan akses pelayanan kesehatan melalui program jamkesda bagi masyarakat kurang mampu - Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bidang pendidikan melalui pemerataan pelayanan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan informal untuk menciptakan SDM yang berkualitas

20. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat lewat melalui pelayanan puskesmas dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit
21. Perluasan akses pelayanan kesehatan melalui program jamkesda bagi masyarakat kurang mampu
22. Peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan Dasar, pendidikan menengah, Non formal dan diprioritaskan pada Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, perluasan akses pasar/promosi, peningkatan akses pada pelayanan dasar seperti papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan Menambah jumlah investor yang digandeng untuk mengembangkan industri kreatif dan usaha menengah masyarakat melalui peningkatan macam dan jenis usaha, pelaksanaan event